

Judul : Salurkan kredit produktif, Komisi II: bank BUMD bantu ekonomi daerah
Tanggal : Minggu, 19 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Salurkan Kredit Produktif

Komisi II: Bank BUMD Bantu Ekonomi Daerah

ANGGOTA Komisi II DPR Muhammad Khozin menyoroti rendahnya penyaluran kredit produktif Bank Usaha Milik Daerah (BUMD). Situasi itu dinilai belum sejalan dengan tujuan utama pendirian perusahaan untuk memperkuat ekonomi lokal. Regulasi menetapkan BUMD harus mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah.

Kata Khozin, aturan terkait BUMD diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemda, Permendagri 118/2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, serta PP 54/2017 tentang BUMD. Namun, terjadi anomali dalam praktik perbankan daerah karena porsi kredit konsumtif justru mendominasi.

Temuan lapangan menunjukkan, 85 persen penyaluran kredit masih bersifat konsumtif, sementara modal kerja dan investasi tidak mencapai 15 persen. Fenomena ini berpotensi menghambat pertumbuhan sektor UMKM dan koperasi. "Penguatan ekosistem ekonomi lokal seharusnya jadi prioritas utama dalam operasional perbankan daerah," ujarnya, kemarin.

Khozin mengakui, peningkatan kredit produktif berisiko menaikkan rasio kredit bermasalah atau NPL di perbankan. Namun, risiko itu tidak boleh jadi alasan mengabaikan fungsi strategis dalam pembangunan

daerah. Direksi dan komisaris ditantang menekan risiko tanpa mengorbankan peran besar bagi ekonomi produktif.

Pasalnya, sambung Khozin, keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari besarnya laba, tapi sejauh mana kontribusinya terhadap pelaku usaha lokal. Bank daerah memiliki privilese melalui captive market transaksi keuangan Pemerintah dan gaji ASN. Dukungan penyertaan modal dari Pemda juga memberikan keunggulan kompetitif yang sangat besar.

Keunggulan yang dimiliki itu seharusnya dimanfaatkan untuk pendorong kinerja dan ekspansi kredit produktif bagi masyarakat. Ketergantungan tinggi terhadap Pemerintah justru bisa menghambat kemandirian serta kesehatan bisnis perbankan. "BUMD harus mulai melepaskan diri dari ketergantungan fiskal agar bisa tumbuh secara lebih profesional," ingatnya.

Selanjutnya, intervensi politik dalam pengelolaan BUMD harus dihindari karena berdampak buruk pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Praktik itu perlu dijauhi agar tata kelola tetap profesional dan berorientasi hasil. Kemandirian manajemen merupakan kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan persaingan bisnis perbankan.

Komisi II DPR, lanjutnya,



Muhammad Khozin

mendorong bank daerah melakukan reorientasi kebijakan bisnis dengan meningkatkan porsi kredit produktif. Penguatan tata kelola harus dilakukan demi menjaga keseimbangan fungsi komersial dan pembangunan. "Perusahaan akan tumbuh maksimal jika minim intervensi politik dan dikelola oleh tenaga ahli profesional," ucapnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menilai, bank daerah belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat kecil. Akibatnya, kontribusi terhadap pembangunan daerah juga minim. Sejalan dengan itu, RUU BUMD diharapkan jadi payung hukum kuat untuk memperbaiki seluruh karut-marut tata kelola perusahaan.

Banyak Pemda, kata Dede, tidak berinvestasi akibat pe-

mangsaan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dan anggaran hanya untuk gaji. UU BUMD diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi yang lebih masif. Regulasi itu akan memperbaiki struktur permodalan dan arah kebijakan investasi daerah secara menyeluruh.

Pengawasan terhadap BUMD, lanjutnya, belum memiliki standar nasional yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, evaluasi kinerja dan pembinaan berjalan berbeda antar daerah. Padahal, bank daerah harusnya mampu jadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar mematuhi regulasi OJK untuk menjadi bank nasional.

Pihaknya kini sedang menghimpun berbagai masukan sebelum melakukan pembahasan mendalam terkait draf RUU BUMD. Regulasi baru itu akan mengatur standarisasi manajemen, transparansi keuangan, serta mekanisme evaluasi kinerja. "Peran pembina dan pengawas juga diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku," katanya.

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen Pemerintah untuk mendorong efisiensi birokrasi dan reformasi BUMD secara total. Tujuannya agar tercipta tata kelola yang lebih akuntabel serta adaptif

terhadap perubahan. Karena saat ini posisi strategis perusahaan daerah belum diimbangi dengan kondisi kesehatan finansial yang cukup optimal.

Pemerintah bersama Komisi II DPR, kata Bima, menyiapkan langkah penataan dan penguatan fondasi lewat melalui penyusunan RUU BUMD. Kebijakan itu diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan besar yang dihadapi daerah. Reformasi ini akan membawa perubahan mendasar dalam sistem operasional serta pengawasan seluruh perusahaan milik daerah.

Kata Bima, regulasi itu akan memisahkan indikator kinerja antara aspek finansial dan pelayanan publik secara lebih tegas. Selama ini kedua hal itu masih bercampur sehingga menyulitkan proses evaluasi objektif. "Pemisahan laporan keuangan diharapkan mampu memberikan gambaran lebih jelas mengenai performa nyata perusahaan," katanya.

Pemerintah juga mendorong pemisahan peran Pemda sebagai regulator dan pemilik modal demi profesionalitas kerja. Fleksibilitas pengelolaan aset dan akses permodalan jadi bagian reformasi agar perusahaan lebih adaptif. Kini, DPR tinggal menunggu Pemerintah mengirim Surpres agar aturan baru ini bisa segera dibahas dan disahkan. ■ PYB